



**AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) BENCANA OLEH GAMPONG
(PELUANG INISIASI OLEH MAHASISWA KULIAH PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(KPM))****Oleh****Jakfar Puteh¹, Syahril², Amrullah³****Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry****Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry****Email : ¹m.jakfarputeh@ar-raniry.ac.id, ³amrullah@ar-raniry.ac.id**

Article History:*Received: 06-10-2022**Revised: 13-11-2022**Accepted: 25-11-2022***Keywords:***KPM, Gampong Tanggap,
Bencana*

Abstract: Kuliah Pengabdian pada Masyarakat (KPM) pasca bencana pernah di laksanakan oleh Universitas Gadjah Mada namun UIN Ar-Raniry mencoba menemukan pola baru yaitu bagaimana KPM Pra Bencana sebagai bentuk pengabdian Universitas membangun Aceh mengantisipasi sebelum bencana. Oleh karena itu penelitian ini mengurai persoalan bagaimana Pola KPM untuk Gampong Tanggap Bencana di Aceh. Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, jenis penelitian ini adalah sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa KKN Reguler berbasis tanggap bencana adalah KKN yang kondusif yaitu di laksanakan pasca recovery lokasi bencana. Selanjutnya untuk KPM tematik tanggap bencana belum pernah di diterapkan di Aceh. KPM tematik tanggap bencana ini selayaknya harus diterapkan di semua kabupaten di Aceh, fungsinya adalah tim KPM ini dapat mempersiapkan struktur Gampong tanggap bencana kapanpun, seperti wabah Covid -19 yang pernah terjadi.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu tugas perguruan tinggi, di samping penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, serta penelitian. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berhubungan dengan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa. Pengabdian kepada masyarakat oleh UIN Ar-Raniry dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Di antara bentuk pengabdian mahasiswa diwujudkan dalam program Pengabdian pada Masyarakat (KPM). KPM merupakan perubahan dari KKN (Kuliah Kerja Masyarakat). KPM sendiri dijadikan matakuliah, sehingga setiap mahasiswa harus mengambilnya.

Sejak dulu mulai dari masih menggunakan istilah KKN (sekarang KPM), UIN Ar-Raniry yang dulunya adalah IAIN Ar-Raniry sudah menerapkan KPM dengan model Reguler, PAR. KPM Reguler itu sendiri merupakan jenis KPM yang pelaksanaannya berbasis All-In atau semua program dapat di lakukan mahasiswa saat mereka bertugas di lokasi KPM. Mulai dari berceramah, mengajar TPA, gotong royong dan lain sebagainya. Kegiatan yang mereka lakukan hanya semata menghabiskan hari-hari di lokasi KPM. Selanjutnya jenis KPM PAR dianggap lebih berbobot, hal ini terkait persoalan pelaksanaan KPM PAR berbasis riset dan



adanya partisipasi warga secara langsung dalam program yang di rencanakan secara bersama mahasiswa KPM PAR itu sendiri. Dan hasil KPM PAR ini lebih berbentuk Produk Nyata dan berkesinambungan.

Dewasa ini sejak tahun 2014 s/d 2018, UIN Ar-Raniry menerapkan PKM Berbasis Mesjid yang sebelumnya dikembangkan oleh UIN Malang, namun pada tahun 2018 UIN Malang mulai meninggalkan KPM Posdaya. KPM Posdaya itu sendiri memfokuskan pada pemakmuran mesjid dan menjadikan mesjid sebagai posko pemberdayaan keluarga. KPM terakhir yang UIN gagas adalah KPM UMD atau Universitas Membangun Gampong. KPM ini merupakan konsep pilot proyek dari NGO KOMPAK Jakarta. Dan hasil yang dari KPM UMD ini yang berlokasi di Kecamatan Arongan Lambalek kabupaten Aceh Barat ini adalah terbangunnya kelompok usaha perempuan di tiga Gampong termiskin di Aceh Barat dan berhasilnya pengembangan Komoditi kerajinan yang berasal dari hama enceng gondok dan selanjutnya di rubah menjadi hasil kerajinan yang mempunyai daya jua yang tinggi serta dapat merubah nasib masyarakat Arongan khususnya para perempuan.

Beberapa contoh KPM yang sudah diterapkan oleh UIN Ar-Raniry sudah mendapat tempat yang khusus dalam keseharian masyarakat Aceh pada umumnya. Kemudian secara geografis, provinsi Aceh sangat sering dan sangat potensial mengalami bencana alam, naik longsor, gempa bumi, banjir, angin puting beliung bahkan sampai pada musibah tsunami sekalipun.

Disisi lain, SDM yang dimiliki UIN Ar-Raniry cukup fantastis. Setiap tahunnya mahasiswa yang masuk ke UIN rata-rata di atas 4000 orang. Kondisi ini sangat produktif apa bila sewaktu-waktu terjadi bencana alam di Aceh dan dalam tanggap darurat tersebut, UIN langsung dapat mengirimkan tenaga relawannya yaitu mahasiswa dari berbagai program studi untuk membantu masyarakat korban bencana.

Belajar dari aksi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada saat terjadi bencana gempa di Lombok pada bulan Agustus 2018, UGM langsung mengirimkan mahasiswanya untuk terjun ke lokasi bencana dengan format KKN tematik tanggap bencana. Mahasiswa KKN UGM sendiri bertugas membantu korban gempa mulai pengurusan soal pengungsian sampai kesehatan masyarakat. Sebanyak 30 mahasiswa dan 19 relawan akan ditempatkan selama satu bulan ke Lombok Utara dan Lombok Timur.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang sangat sering terjadi bencana alam, mulai bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan lainnya. Namun terkadang pasca bencana alam terjadi banyak korban dari masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tenaga dari orang lain, baik dari segi komunikasi bantuan, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini sangat sulit diwujudkan pada awal awal pasca bencana terjadi.

UIN Ar-raniry secara kuantitas memiliki SDM yang sangat memadai untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat tersebut, namun selama ini segala bentuk baksos yang dilakukan oleh para mahasiswa tidak mempunyai nilai akademik sama sekali, artinya bakti social yang dilaksanakan mahasiswa kepada korban bencana hanya sebagai pengabdian semata dana mal banti saja.

Beranjak dari persolan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang konsep KKN berbasis tanggap bencana UGM untuk nantinya dapat diterapkan di UIN Ar-raniry Banda Aceh. Sehingga bernilai akademis atau setara dengan SKS KPM itu sendiri.

Pengabdian Berbasis Tematik



KPM tematik adalah Kuliah Pengabdian pada Masyarakat yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota). KPM Tematik berbasis Problem Solving untuk memecahkan masalah dengan tema tertentu sehingga kegiatan mahasiswa terfokus untuk mengatasi masalah tertentu dan untuk mencapai target tertentu.

Ciri-ciri dari KPM tematik yaitu :

1. Program kegiatan dirancang tematik, melembaga, berkesinambungan dan berbasis kompetensi
2. Mencerminkan kompleksitas permasalahan dan arah kebijakan pembangunan pemerintah
3. Dilaksanakan oleh mahasiswa, DPL dan masyarakat
4. Dilaksanakan waktu terbatas, efisien, efektif dengan mengedepankan kepentingan akademik dan kepentingan masyarakat. (*Sepenggal.Info/Perbedaan-Kkn-Tematik-Dan-Kkn-Posdaya*, n.d.)

Sifat dari KPM Tematik yaitu :

Sifat KPM tematik adalah melembaga, koordinatif, interdisipliner, berkesinambungan dan berbasis kemasyarakatan.

Prinsip Dasar KPM Tematik :

Prinsip dasar KPM tematik didasarkan pada beberapa prinsip dasar, dimana diharapkan dosen dan mahasiswa kpm tematik mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat, mencari penyelesaian bersama masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan melaksanakan kegiatan sebagai bentuk penyelesaian masalah. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan mampu membuat masyarakat berswadaya, berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah :

1. Keterpaduan aspek tri dharma perguruan tinggi aspek pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi kkn tematik.
2. Pencapaian tiga manfaat utama kpm tematik kpm tematik dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (personality development), pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan pengembangan institusi (institutional development).
3. Empati-partisipatif kpm tematik dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. Kpm tematik dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. Keterlibatan kedua belah pihak dalam perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan pengusahaan pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola kpm tematik harus mampu mengadakan pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif.
4. Interdisipliner kpm tematik dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh dosen pembimbing lapangan (dpl). Dalam operasionalnya mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan



pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi kpm tematik.

5. Komprehensif-komplementatif dan berdimensi luas kpm tematik berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikian diharapkan mahasiswa peserta kpm tematik mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan proporsional. (<https://Docplayer.Info/145687-Pedoman-Pelaksanaan-Kuliah-Kerja-Nyata-Kkn-Tematik-Pusat-Kajian-Kuliah-Kerja-Nyata-Dan-Pemberdayaan-Masyarakat-Lembaga-Penelitian-Dan-Pengabdian.Html>, n.d.)
6. Realistis-pragmatis program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
7. Environmental development kpm tematik dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama prinsip pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kpm tematik dilakukan dengan prinsip :
 - a. Co-creation (gagasan bersama) kpm tematik dilaksanakan berdasar pada suatu tema dan program yang merupakan gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, panitia kkn dan pusat kajian) dengan pihak pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat.
 - b. Co-financing/co-funding (dana bersama) kpm tematik dilaksanakan dengan pendanaan bersama antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan tema dan program yang telah disepakati.
 - c. Flexibility (keluwesan) kpm tematik dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah dan mitra dalam proses pembangunan di daerah.
 - d. Sustainability (berkesinambungan) kpm tematik dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai dengan tempat dan target tertentu. E. Research based community services (berbasis riset) dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat; sehingga lebih mendayagunakan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan proses pembangunan.

Prinsip Pelaksanaan KPM Tematik :

1. Keterpaduan
2. Kebutuhan
3. Kemampuan sendiri
4. Interdisipliner
5. Partisipatif
6. Keberlanjutan

Tujuan KPM Tematik :

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan kualitas kesehatan
3. Peningkatan daya beli masyarakat
4. Kemadirian pangan
5. Peningkatan daya kerja aparatur



6. Peningkatan infrastruktur wilayah
7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku
8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup
9. Pembangunan perGampong
10. Pengembangan budaya lokal

Pola KPM untuk Gampong Tanggap Bencana di Aceh

a. Kebijakan dan Strategi Gampong Tanggap Bencana di Aceh

1). Kebijakan Pengembangan Gampong Tangguh Bencana

Gampong tangguh bencana adalah Gampong yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah gampong tangguh bencana adalah sebuah Gampong atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan paca darurat.

Pengembangan Gampong Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Gampong Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada diwilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Pasal 4 undang-undang No 24/2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAB II), menetapkan bahwa pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk, antara lain, melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui :

- a. Pemberian informasi dan pengetahuan tentang bencana dan risiko bencana di wilayahnya;
- b. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. Perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
- d. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekontruksi.

Gampong Tangguh bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Sosial Nasional Penanggulangan Bencana (Renal PB) 2010-2014 antara lain: penanggulanagn bencana berbasis masyarakat; peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah; dan pemanduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan. Setelah mengandung empat aspek yang digariskan di dalam prakarsa penguran Nomor 3 tahun 2008 di atas, Gampong Tangguh bencana juga mengandung aspek pemanduan



prakarsa pengurangan risiko masyarakat kedalam proses pengembangan daerah. Pemanduan prakarsa pengurangan risiko kedalam proses masyarakat ke dalam proses pengembangan daerah.

Tujuan khusus pengembangan Gampong Tangguh bencana ini adalah

- a. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemelihara kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
- e. Meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintahan daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya peduli.

Sesuai UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, pemerintahan Pusat dan pemerintahan daerah menjadi penanggung jawab bencana. Pengembangan Gampong Tangguh bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksana tanggung jawab ini yang peraturannya diserahkan kepada Gampong, dan menjadi tanggung jawab pemerintah Gampong atau kelurahan. Pemerintahan dan pemerintahan daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh Gampong. Pengembangan Gampong Tangguh Bencana harus mencakup dalam rencana pembangunan Gampong, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Keraj Pemerintahan Gampong.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Gampong Tangguh Bencana dibahas melalui forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kelurahan Tangguh bencana diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kota. Pada tingkat pelaksana di Gampong, pengembangan Gampong Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal peraturan Kepala Gampong yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.

2). Karakteristik Gampong Tangguh Bencana di Aceh

Secara garis besar Gampong Tangguh Bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Legislasi: penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Gampong.
- b. Perencanaan: penyusunan rencana Penanggulangan Gampong; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan rencana Aksi pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- c. Kelembagaan; pembentukan forum Penanggulan Bencana Gampong yang berasal dari unsur pemerintahan dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerja sama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.



- d. Pendanaan; rencana mobilisasi dan sumber daya (dari APBD kabupaten / kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).
- e. Pembangunan kapasitas; pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
- f. Penyelenggaraan penanggulangan bencana; kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

3). Strategi Gampong Tangguh Bencana di Aceh

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Gampong Tangguh Bencana antara lain meliputi:

- a. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
- b. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminim mungkin.
- c. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementrian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat Gampong.
- d. Dukungan dalam bentuk dokumen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan Gampong sesuai dengan kebutuhan dan bila dihendaki masyarakat.
- e. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di Gampong mereka dan akan kerentanan warga.
- f. Pengurangan kerentanan masyarakat Gampong untuk mengurangi dan beradaptasi bencana.
- g. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- h. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
- i. Pemanduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan.
- j. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial Gampong, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Inisiasi Pilot Project Kuliah Pengabdian Pada Masyarakat Tematik Gampong Tangguh Bencana di Gampong Alue Naga Kota Banda Aceh Oleh Tim Peneliti UIN Ar-Raniry 2019

1). Assesment Awal

Awal dari aksi assesment Peneliti yaitu menjumpai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yaitu Bapak Teuku Ahmad Dadek. Ahmad Dadek, Pola KPM Tematik



gampong tangguh bencana belum pernah di laksanakan oleh UIN, IAIN atau STAIN. Namun ada dua universitas yang pernah melaksanakan KKN respons bencana di Aceh, tetapi belum terukur hasilnya.

Secara Umum Badan Penanggulangan Bencana Aceh pada dasarnya juga sudah memiliki beberapa panduan terkait Gampong Tangguh bencana, namun juga belum maksimal.¹ Kepala BPBA sangat mendukung dari keinginan TIM Peneliti dan pengabdian UIN Ar-Raniry untuk membuat panduan KPM tematik berbasis gampong tangguh bencana di Aceh. Pak Ahmad Dadek mengusulkan Gampong Ulee Lheu untuk di jadikan sampel. Disisi lain beliau juga menyarankan bahwa panduan ini nantinya harus berhasil dan bisa disharing dengan BPBA untuk disempurnakan guna kedepan bisa diperbanyak. Harap kepala BPBA ini adalah kedepan semua gampong mempunyai TIM tangguh bencana masing-masing.

2). Survei Lokasi Pilot Project Oleh Tim Peneliti

Tim peneliti memilih satu Gampong sebagai pilot project, hal ini dikarena karena regulasi UI tahun 2019 belum membolehkan Tim Menurunkan mahasiswa sebagai mahasiswa KPM. Gampong Alue Naga merupakan Gampong yang saat masa Bencana Tsunami menjadi Gampong pertama di terjang ombak tsunami karena daerahnya tepat di pinggir pantai. Dan untuk sementara dari hasil pengamatan peneliti juga sangat rentan dengan bencana alam seperti pasang air laut, angin badai, banjir bandang, gempa, bahkan abrasi pantai.

3) Rekrutment Relawan Mahasiswa Program Pilot Project

Tim peneliti selanjutnya menerjunkan 4 (empat) mahasiswa semester akhir untuk melakukan survei awal ke Gampong yang dianggap cocok sebagai lokasi pilot project pengembangan modul KPM tematik desa tangguh bencana. Gampong yang terpilih adalah Gampong Alue Naga yang merupakan salah satu desa dari Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Gampong Alue Naga merupakan desa yang luar biasa kondisinya saat bencana tsunami 2004 silam. Bahkan dua dari empat dusun didesa ini hilang menjadi laut.

Dari hasil survei para tim peneliti pengabdian, menemukan bahwa Gampong alue naga tidak memiliki gedung evakuasi bencana apapun, simbol-simbol evakuasi bencana seperti banjir bandang, angin badai, ombak pasang, tsunami dll, di temukan hanya beberapa tetapi tidak dalam kondisi terawat, secara geografis Gampong Alue Naga berada di bibir pantai dan di ujung Kuala.

a) Pemetaan Awal Lokasi Pilot Project Oleh Relawan Mahasiswa

i. Identifikasi Simbol-simbol Siaga Bencana Gampong

ii. Identifikasi Escape Building Gampong

b) Mengidentifikasi Kebijakan Gampong Terkait Siaga Bencana Bersama Aparatur Gampong Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

c) Membuat Peta Gampong Oleh Relawan Mahasiswa

Kemudian, jika di ukur dengan parameter syarat desa tangguh/tangguh bencana yang di keluarkan BPBA maka dapat di simpulkan bahwa ;

- Secara Legislatif : Gampong Alue Naga belum adanya upaya untuk membuat peraturan desa yang mengatur tentang pengurangan risiko dan penanggulangan bencana, sehingga masyarakat masih awam pengetahuan tentang bencana walaupun ada rambu-rambu himbauan rawan kebencanaan.

¹ Wawancara dengan Kepala BPBA, Teuku Ahmad Dadek, tanggal 10 juli 2019.



- Perencanaan : mengenai perencanaan rencana penanggulangan bencana Desa sudah ada tapi belum sampai pada tahap penyusunan dokumen.
- Kelembagaan: belum adanya upaya awal untuk membentuk forum PRB akan tetapi sudah udah pembicaraan untk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, walupun belum ada kerjasama yang disepakati secara tertulis.
- Pendanaan : dalam hal pendanaan sudah ada upaya-upaya yang dilakukan seperti pengelolaan dan mekanisme penggunaan untuk mengalokasikan dana khusus yang digunakan untuk bencana tanggap darurat, contohnya untuk kegiatan pengurangan resiko bencana diantara pembangunan tanggul sungai dan pemecah gelombang sedangkan penanam pohon, pelatihan kebencanaan dan penataan pemukiman masih dalam wacana.
- Pengembangan kapasitas : belum adanya pelatihan pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana.
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana : belum ada upaya untuk melakukan pemetaan, analisis ancaman, kerentanan, kapasitas, sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat untuk memberikan waktu peneyelematan diri dan aset dan belum adanya perlindungan aset-aset produktif masyarakat seperti asuransi komunitas dan gudang bersama.
- Sedangkan untuk melihat resiko pada desa sudah ada rencana pembuatan peta dan jalur evakuasi dan menyediakan evakuasi khusus untuk tempat pengungsian ketika terjadi bencana, sedangkan dalam hal praktik simulasi belum pernah dilakukan, akan tetapi untuk mengurangi resiko bencana telah dilakukan pembangunan fisik seperti membuat tanggul sugai dan pemecah gelombang namun mekanisme untuk pengelolaan dan pemeliharaan pembangunan fisik tersebut belum ada. Sedangkan dalam hal pengembangan ekonomi telah dibuat renacana untuk meningkatkan produksi, memperluas akses pasar dan membuat sumber ekonomi yang lain yang lebih aman dari ancaman bencana selain itu juga sudah ada skema program perlindungan kesehatan dan santunan sosial bagi kelompok-kelompok rentan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa bahwa KKN Reguler berbasis tanggap bencana adalah KKN yang kondusif yaitu di laksanakan pasca recovery lokasi bencana. Selanjutnya untuk KPM tematik tanggap bencana belum pernah di terapkan di Aceh. KPM tematik tanggap bencana ini selayaknya harus diterapkan di semua kabupaten di Aceh, fungsinya adalah tim KPM ini dapat mempersiapkan struktur Gampong tanggap bencana kapanpun, seperti wabah Covid -19 sebelumnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Analiansyah, M.Ag, Dkk, Buku Panduan Kuliah Pengabdian Masyarakat Berbasis Partisipatory Action Research dan Participatory Rural Appraisal, Penerbit LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014
- [2] Agussalami Sitompul, Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat , Yogyakarta, Balai Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Sunan Kali Jaga, 1993
- [3] Buku Paduan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Gampong Berbasis Masjid (Melalui Pos



- Pemberdayaan Keluarga), P2M UIN Ar-Raniry, 2015.
- [4] Biro Organisasi dan Tata Laksana (makalah) , Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementrian Agama.
 - [5] Departement Agama R.I Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Pengabdian Masyarakat; Hasil pengalaman pendampingan masyarakat berbasis Participatory Action Research (PAR), Jakarta ,2009
 - [6] Husen A, Wahab, Perspektif Masyarakat terhadap kuliah pengabdian masyarakat (KPM) IAIN Ar-Raniry, Puslit IAIN Ar-Raniry, 2013.
 - [7] Jakfar Puteh, M. Eksistensi Remaja Masjid dan Masjid, dalam Perkembangan Dakwah Kontemporer (Esai-esai Dakwah Aplikatif), LSAMA Banda Aceh, 2016.
 - [8] Joko Prastowo, Belajar Dari Masyarakat best practies program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat LPPM UGM , Yogyakarta, Samudra Biru : 2010
 - [9] Kemeterian Agama R.I, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Buku Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedure, Ditjen Pendidikan Tinggi, Islam, Jakarta, 2010.
 - [10] Keputusan Menteri Agama RI, No. 168 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedure di Lingkungan Kemeterian Agama
 - [11] LP2M dan UIN –MALIKIPres, Menjadi Sejahtera dan Mandiri Bersama Posdaya Masjid Kabupaten Malang. Malang, UIN –MALIKIPres .2014.
 - [12] Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh mahahaiswa, PPM-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2013.
 - [13] Soetandyo, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi, Surabaya, 2009